

TEKAN PENYEBARAN PMK

Ditargetkan 80 Persen Ternak Tervaksin

YOGYA (KR) - Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya guna membantu pemerintah pusat menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) agar tidak semakin meluas. Hingga saat ini, Pemda DIY telah melaksanakan penanganan PMK melalui percepatan vaksinasi, pengobatan bagi ternak yang sakit dan bisa disembuhkan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunitas.

"Pemerintah telah melakukan upaya agar penyebaran PMK tidak semakin meluas. Ada tiga prinsip dasar pengendalian PMK yang dilakukan. Pertama, yang dilakukan terkait upaya pengendalian PMK, yakni mencegah kontak hewan rentan PMK dengan sumber virus PMK, isolasi hewan terpapar PMK, pengendalian lalu lintas hewan ternak dan pengawasan. Kedua, menghentikan produksi virus dan sirkulasi di lingkungan dengan dekontaminasi dan disposal. Sedangkan ketiga adalah meningkatkan kekebalan hewan rentan dengan vaksinasi," kata Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Penanganan

PMK di DIY oleh Satgas PMK Pusat, di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan, Rabu (5/10).

Wagub mengatakan, pemerintah menargetkan 80 persen hewan ternak telah tervaksin hingga akhir Desember 2022. Dengan demikian, untuk mencapai target tersebut, kecepatan proses vaksinasi jelas dibutuhkan. Namun perlu koordinasi erat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis kesehatan hewan, peternak, hingga kepolisian yang tergabung dalam satuan tugas penanganan PMK.

"Atas nama Pemda DIY, saya mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan rekomendasi dari hasil

monitoring dan evaluasi Tim BNPB. Hasil monitoring dan evaluasi akan kami tindak lanjuti seoptimal mungkin. Harapan kami, nanti diskusi ini bisa menghasilkan komitmen-komitmen yang kami distribusikan ke kabupaten/kota dalam rangka percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku," paparnya.

Sementara itu, Deputy Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyatakan, kunjungan kali ini berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penanganan PMK di DIY. Adapun monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat gap permasalahan apa yang terdapat di lapangan terkait dengan lima hal, yaitu biosecurity, testing, pengobatan, potong bersyarat, dan vaksinasi.

"Jadi lima hal ini, data apa saja, informasi apa yang terintegrasi untuk bisa kita dorong menjadi suatu informasi untuk melakukan percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku ini," ucap

Raditya.

Disebutkan Raditya, pada hari pertama pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, pihaknya telah mendapatkan informasi terkait beberapa permasalahan. Seperti jumlah vaksinator, pengobatan, kondisi geografis yang sangat bervariasi, lokasi peternak, dan lain sebagainya. Sedangkan pada hari kedua, pihaknya membagi menjadi empat kelompok, melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke empat kabupaten di DIY, yakni Sleman, Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto dalam paparannya menyatakan, jumlah seluruh ternak rentan PMK di DIY mencapai total 922.995 ekor. Jumlah tersebut di antaranya terdiri dari sapi perah sebanyak 3.474 ekor, sapi potong sebanyak 314.388 ekor, kerbau sebanyak 427 ekor, domba sebanyak 150.837 ekor, kambing sebanyak 444.099 ekor, dan babi sebanyak 9.730 ekor. Berdasarkan update situasi PMK di DIY pada 3 Oktober 2022 lalu,

jumlah ternak yang sakit sebanyak 13.829 ekor. Sementara untuk ternak yang sembuh, yakni sejumlah 7.918 ekor, ternak mati sejumlah 516 ekor, dan ternak potong bersyarat sejumlah 459.

"Dari hari ke hari, kasus harian PMK di DIY cenderung menurun dibandingkan pada situasi awal penyebaran kasus PMK di Indonesia. Adapun beberapa langkah penanganan PMK di DIY yang diantaranya yakni, pengawasan, pengendalian, dan penerapan biosecurity lalu lintas hewan rentan dan produknya melalui check point di 7 pos lalu lintas ternak, bekerja sama dengan Tim Satgas PMK DIY dan melaksanakan sosialisasi dan KIE tentang PMK baik secara luring maupun melalui media massa atau media sosial," jelasnya.

Mengenai target penanganan PMK di DIY sendiri, penandaan ternak ditargetkan yaitu sebanyak 311.229 ekor. Sementara target untuk vaksinasi PMK tahap I sejumlah 306.429 dosis dan tahap II sebanyak 311.229 dosis. Adapun target untuk pengobatan, yakni sejumlah 48.300 dosis. **(Ria)-f**

HUT TNI, Polsek Kunjungi Koramil



KR-Istimewa

Kapolsek Pakualaman dan jajarannya berkunjung ke Makoramil 05/Pakualaman Rabu (5/10), menyambut HUT TNI ke-77

YOGYA (KR) - Menyambut HUT ke-77 TNI Tahun 2022, Kapolsek Pakualaman Kompol Sigit SIK beserta anggotanya berkunjung ke Makoramil 05/Pakualaman, Rabu (5/10). Rombongan Kapolsek disambut hangat Wadanramil 05/Pakualaman Kapten Inf Surono beserta anggota.

"Kunjungan sebagai wujud simpati dengan momen HUT TNI untuk memperkuat sinergitas dalam rangka pelaksanaan tugas di wilayah binaan," ungkap Kapolsek dengan membawa nasi tumpeng.

Dengan ucapan Dirgahayu TNI ke-77

"TNI Adalah Kita" , Sigit berharap TNI semakin jaya dan selalu kompak bersama Polri.

"Semoga TNI semakin profesional menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia," ungkap Kapolsek.

Senada Wadanramil 05/Pakualaman Kapten Inf Surono berharap berbagai agenda dan rutinitas kerja terus menjaga sinergitas dan keharmonisan TNI-Polri. Dilanjutkan potong tumpeng dan doa bersama. Acara berlangsung dengan akrab dan guyub. **(Vin)-f**

HARGA KEBUTUHAN POKOK MASIH STABIL TINGGI

Pemkot Jalin Kerja Sama Antar Daerah

YOGYA (KR) - Hingga saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Yogya masih stabil tinggi. Pemkot Yogya pun telah menjalin kerja sama antar daerah guna mengendalikan potensi laju kenaikan harga tersebut.

Kepala Bidang Keterseediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Riswanti, menjelaskan saat ini Pemkot Yogya mengupayakan kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain di DIY. Terutama yang menjadi produsen cabai dan produk pertanian lain. Kerja sama antar pemerintah daerah ini ditujukan untuk menjaga suplai ke pasar agar pasokan selalu cukup sehingga harga bisa stabil.

"Misalnya saat Sleman surplus panen cabai dan Kota Yogya butuh tambahan pasokan, maka produk tersebut tidak dijual keluar tetapi masuk ke pasar induk Yogyakarta sehingga harga cabai terkendali," urainya, Rabu (5/10).

Sedangkan untuk stok bahan kebutuhan pokok, Riswanti memastikan tidak ada kendala karena distribusi tetap lancar sehingga kebutuhan pangan selalu bisa terpenuhi. Hal ini karena Kota Yogya bukan daerah produsen bahan pokok sehingga mengandalkan distribusi dari daerah lain. "Sejauh ini, tidak ada kendala dalam distribusi

dan pasokan sangat lancar," imbuhnya.

Diakuinya, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kota Yogya pada awal Oktober stabil tinggi namun pasokan dipastikan cukup. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan di sejumlah pasar tradisional. Menurutnya, kelompok bahan kebutuhan pokok yang masuk dalam kategori stabil tinggi apabila harga jualnya sudah melebihi harga eceran tertinggi untuk konsumen. Bahan kebutuhan pokok tersebut di antaranya daging sapi yang kini dijual dengan harga rata-rata Rp 130.000 per kilogram (kg). "Sebenarnya harga daging sapi tersebut sudah bertahan menjelang Lebaran hingga saat ini. Harga tersebut tergolong tinggi dan untuk menurulkannya cukup sulit," tandasnya.

Begitu pula dengan kedelai yang dijual pada harga

Rp 13.000 per kg atau sudah melebihi harga eceran yang ditetapkan yaitu sekitar Rp 6.800 per kg untuk kedelai impor dan Rp 9.200 per kg untuk kedelai lokal. Sedangkan harga beras juga cukup stabil meskipun sempat naik Rp 500 per kg tetapi kembali turun ke harga semula yaitu Rp 11.500 per kg.

Meskipun demikian, ada pula sejumlah bahan kebutuhan pokok yang harganya sudah kembali turun seperti cabai rawit yang kini rata-rata dijual Rp 55.000 per kg dan Rp 45.000 per kg untuk cabai merah keriting. Harga telur ayam juga mulai turun menjadi Rp 23.000 per kg.

"Untuk saat ini yang kami antisipasi adalah produk pertanian yang terpengaruh hujan. Misalnya cabai. Mudah-mudahan panen tetap aman dan tidak ada kenaikan harga karena dalam beberapa hari terakhir terjadi hujan cukup deras," katanya. **(Dhi)-f**

KEDEPANKAN YUSTISI DAN NONYUSTISI

Pelanggaran Reklame Tak Luput dari Penertiban

YOGYA (KR) - Upaya menjaga estetika Kota Yogya yang dilakukan Pemkot Yogya tidak sebatas menata kawasan atau wilayah. Pelanggaran papan reklame pun tak luput dari penertiban.

Sat Pol PP Kota Yogya mencatat hingga kini sudah ada 91 kasus pelanggaran Perda Penyelenggaraan Reklame yang diproses secara yustisi di pengadilan. Total denda yang harus dibayar pengelola reklame pun mencapai sebesar Rp 114,75 juta.

"Kami melakukan dua jenis kegiatan penegakan peraturan daerah tentang reklame, yaitu yustisi dan nonyustisi. Semuanya berjalan beriringan dengan tujuan menjaga estetika Kota Yogya," jelas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, Rabu (5/10).

Proses yustisi dilakukan terhadap papan reklame yang diketahui tidak memiliki izin sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Hal ini karena tidak ada pemasangan dari pajak reklame yang masuk sebagai pendapatan asli daerah. Sedangkan proses penegakan nonyustisi dilakukan dengan memberikan peringatan, menghen-

tikan fungsi papan reklame dengan cara menempel stiker atau menutup reklame hingga pembongkaran sehingga papan reklame tidak lagi bisa difungsikan. "Hanya, ada kendala dalam penegakan aturan. Biasanya kami sulit mengetahui pemilik atau pengelola papan reklame yang menyalahi aturan tersebut," imbuhnya.

Dodi menjelaskan, kegiatan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak hanya dilakukan terhadap papan reklame berukuran besar atau baliho, tetapi juga terhadap reklame insidental yang biasanya berbentuk spanduk dan rontek. Untuk reklame insidental yang berukuran kecil, petugas diberi kewenangan langsung melakukan penertiban atau pembongkaran jika reklame tersebut tidak berizin atau pemasangannya menyalahi aturan. "Misalnya dipasang di fasilitas umum, di tiang listrik, rambu lalu lintas atau di taman. Petugas bisa langsung membongkar," tandasnya.

Sedangkan untuk papan reklame berukuran besar dan terpasang permanen, maka ada mekanisme penertiban yang harus dilalui, yaitu diawali dengan pem-

berian surat peringatan dan pemilik atau pengelola masih diberi kesempatan mengurus perizinan.

Dirinya menyebut penertiban reklame menjadi tugas rutin personel Sat Pol PP Kota Yogya saat melakukan patroli keliling. "Jika tidak dilakukan penertiban rutin, maka Kota Yogya bisa tertutup reklame," katanya yang menyebut lokasi di sekitar simpang jalan menjadi titik favorit pemasangan reklame.

Sejak Januari hingga Akhir September 2022 total reklame yang ditertibkan tercatat sebanyak 3.433 terdiri atas 3.295 penertiban reklame insidental, 129 pemberian peringatan, empat pembongkaran, dan lima penghentian fungsi. "Kami juga melakukan penertiban reklame dari hasil rekomendasi BPK, reklame tersebut diketahui tidak membayar pajak," terangnya.

Hingga akhir Maret 2022 tercatat 152 reklame yang direkomendasikan BPK untuk ditertibkan dan terus berproses sehingga saat ini tersisa 62 reklame. Namun sebagian ada yang sudah diberi surat peringatan terakhir, dihentikan fungsinya serta memenuhi kewajiban membayar pajak. **(Dhi)-f**

PERINGATI HARI PENGLIHATAN SEDUNIA

Perdami Operasi Katarak Gratis

YOGYA (KR) - Sardjito Eye Center bekerja sama dengan Departemen Ilmu Kesehatan Mata dan Departemen Kedokteran Keluarga Layanan Primer FK-KMK UGM, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) DIY serta Lions Club Manggala Mataram menggelar serangkaian kegiatan peringatan Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day) 2022. Tahun ini mengangkat tema 'Sayangilah Penglihatanmu'.

Koordinator kegiatan, dr Firman Setya Wardhana MKes SpM(K) menuturkan, kegiatan diawali seminar untuk awam bertajuk 'Bincang Asik Pilihan Anda (Bakpia)' pada Jumat, 7 Oktober 2022 yang akan disampaikan oleh dr Reny Setyowati SpM dengan topik 'Kesadaran Kesehatan Mata pa-

da Keluarga' dan dr Supanji MKes PhD SpM(K) dengan topik 'Waspada Retinopati Diabetika'.

Selanjutnya, pada Minggu, 9 Oktober 2022 akan diadakan kegiatan jalan sehat yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis untuk anak-anak usia sekolah dasar di sekolah sekitar kampus UGM dengan gangguan penglihatan. Pada hari yang sama juga akan diadakan pemeriksaan kesehatan mata dan skrining Retinopati Diabetika (RD) untuk dosen-dosen UGM yang memiliki Diabetes Mellitus.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat Gedangsari Gunungkidul yang merupakan desa binaan FK-KMK UGM.

"Kegiatan ini penting diadakan untuk membantu masyarakat yang masih sulit mengakses layanan kesehatan mata terkait masalah katarak," kata Firman di Poli Mata RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, Rabu (5/10).

Prof dr Suhardjo SU SpM(K) dari Divisi Oftalmologi Komunitas FK-KMK UGM, berharap masyarakat dapat memahami pentingnya kesehatan mata dan mulai menyayangi mata mereka dengan rutin memeriksakan mata, terutama mereka yang memiliki faktor risiko gangguan penglihatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga akan terus digalang terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan mata. **(Dev)-f**

Pelajari Implementasi Moderasi Beragama Peserta PKN Tingkat II Kunjungi Yogyakarta

YOGYA (KR) - Sebanyak 30 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2022 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, mengunjungi Yogyakarta, Selasa (4/10) malam. Kegiatan studi lapangan ini akan berlangsung hingga Jumat (7/10) mendatang.

Tujuan pertama visitasi, yakni Kantor Gubernur DIY di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Rombongan diterima Gubernur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso di Gedhong Pracimosono Pemda DIY.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof Suyitno yang hadir langsung memimpin rombongan mengatakan ada dua target yang hendak dicapai. "Perta-



KR-Istimewa

Peserta PKN Tingkat II saat berada di kantor gubernur.

ma, kami ingin memastikan strategi implementasi moderasi beragama di Yogyakarta, dengan mengambil sasaran dua tempat yakni Kesbangpol DIY dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," ungkapnya.

Hal ini menurutnya sangat strategis karena Menteri Agama mencanangkan pengarusutamaan moderasi beragama. "Pak Menteri selalu mengingatkan agar seluruh elemen bangsa turut menja-

ga NKRI dengan memastikan pemahaman agama yang moderat, inklusif bukan eksklusif, serta memberikan keteduhan," jelasnya.

Target kedua, seluruh peserta nantinya akan membuat Policy Brief sebagai rekomendasi Moderasi Beragama. "Maka menjadi penting untuk melakukan observasi langsung di lapangan," imbuh Suyitno.

Sementara Gubernur da-

lam sambutan yang dibacakan Dewo Isnu Broto menyebut dalam konteks DIY, moderasi merupakan konsep fundamental yang telah diyakini sejak zaman nenek moyang. "Secara implisit maupun eksplisit moderasi tertuang dalam falsafah Hamemayu Hayuning Bawono," ungkapnya.

Menurut Gubernur, falsafah ini menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. "Dasarnya adalah pemahaman atas tiga hal yakni kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan kebijaksanaan manusia, pengabdian satriya lahirkan kesejahteraan dan ketentraman negara, dan kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya," jelas Gubernur. **(Feb)-f**

